

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Literature Review*

Pertama, Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia oleh Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum berdasarkan data sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi partai berpengaruh terhadap pembaharuan dan rekrutmen partai politik, dan proses ini menunjukkan adanya dinasti politik yang berpengaruh pada pembaharuan yang tidak sehat, dan mahar politik berpengaruh pada persaingan tidak sehat diantara anggota partai politik, dan faktor popularitas berpengaruh terhadap kecepatan seseorang dapat menjadi anggota politik suatu partai²². Penelitian oleh Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi menjelaskan secara umum keberadaan fungsi partai politik, sedangkan penelitian ini lebih memperdalam pembahasan spesifik pada PDI-Perjuangan dan sayap partai BMI.

Kedua, Efektivitas Keberadaan Organisasi Sayap Partai Gerindra Terhadap Kaderisasi Politik Partai Gerindra Aceh oleh Furqan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pada pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara kemudian dokumentasi. Pada penelitian memiliki hasil yaitu adanya Sayap Partai Gerindra Aceh kemudian berperan dan berfungsi

²² Wiyayanti & Iswandi. Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia, Yogyakarta : SASI, Vol 27 No 4, 2021, hal. 481

untuk sarana penarikan calon anggota, pendidikan politik serta penciptaan kader politik itu sendiri. Namun, pelaksanaannya yang masih parsial dan tidak sistematis yang menyebabkan sayap partai belum efektif. Harapan bagi Partai Gerindra Aceh adalah memberikan keseriusan terhadap organisasi dari sayap politik dan memberikan manfaat untuk kegiatan kaderisasi kader yang sistematis dan efektif²³. Penelitian oleh Furqan memfokuskan penelitian pada partai Gerindra Aceh. Sedangkan penelitian skripsi ini memfokuskan pada Partai PDI-P dengan pisau analisis yang saat ini yaitu fungsi rekrutmen politik dalam menciptakan kader politik.

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

2.2.1 Konsep dan Teori Kaderisasi Politik

Istilah kader berasal dari kata “kader”, kader merupakan kata yang berasal dari istilah kemiliteran atau pertempuran yang selanjutnya berasal dari kata “carde” yang diartikan sebagai latihan terus menerus dari suatu kekuatan inti yang diperlukan setiap saat. Menurut definisinya, menurut kamus ilmu pengetahuan populer, kader adalah orang yang telah dilatih untuk melanjutkan kepemimpinan atau keorganisasian suatu partai atau organisasi (Partanto dan Bahri, 1994: 293-294). Dengan kata lain, kader diartikan sebagai individu yang diharapkan memegang peranan penting dalam organisasi.

²³ Furqan, *Efektivitas Keberadaan Organisasi Sayap Partai Gerindra Terhadap Kaderisasi Politik Partai Gerindra, Aceh* : Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2019, hal. 1

Menurut kamus ilmiah, kader dapat diartikan sebagai orang yang dididik untuk melanjutkan partai politik suatu partai. Dalam kamus induk istilah ilmiah seri menyebutkan bahwa kader merupakan generasi penerus organisasi, pemerintahan maupun partai ²⁴.

Kaderisasi menjadi sebuah siklus atau perputaran yang terus terjadi dan selalu meningkat. Terdapat tiga komponen utama dari kaderisasi itu sendiri, diantaranya adalah pendidikan kader yaitu pemberian pengetahuan yang diperlukan, kemudian penugasan yaitu kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan organisasi dan yang terakhir adalah penerahan karir, yaitu pemberian tanggung jawab bagi kader untuk menggunakan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing kader ²⁵.

Pengkaderan adalah orang yang didik untuk menjadi pelanjut tongkat estafet suatu partai atau organisasi, calon tunas muda, generasi muda²⁶. Kader diartikan sebagai orang yang diharapkan menduduki jabatan atau posisi penting di pemerintahan, di partai dan lain-lain. Pengkaderan merupakan tindakan mendidik atau membentuk seseorang dalam proses menjadi anggota partai. Pembaruan kepemimpinan mengacu pada proses dimana seseorang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin pengganti dimasa depan ²⁷.

²⁴ Partanto, Pius A, M.Dahlan Al-Barry, (1994). Kamus Ilmiah Populer, Arkola. Surabaya. Hal,29

²⁵ Mangkubumi. (1989). Kaderisasi dalam organisasi massa dan politik. Hal,59.

²⁶ *Op cit.* Hal, 23.

²⁷ Veithzal, R, dan Mulyadi, D. (2011). Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi. Jakarta:PT.Raja Gravindo persada. Hal, 96.

Bung Hatta menjelaskan bahwa kaderisasi merupakan sebuah dasar kebangsaan. Kaderisasi menurut Bung Hatta merupakan penanaman bibit atau calon pemimpin dari bangsa. Kaderisasi diperlukan dikarenakan seseorang yang saat ini menjabat dan menjadi pemimpin suatu saat akan selesai masa kepemimpinannya. Oleh karena itu perlu adanya kaderisasi atau pengkaderan untuk menggantikan pemimpin yang menyudahi masa jabatan itu sendiri. Faktor yang menyebabkan kaderisasi diperlukan diantaranya adalah adanya periode kepemimpinan, penolakan anggota, proses alamiah yaitu usia seseorang dan perkiraan pemimpin di masa depan yang diperlukan²⁸.

Kaderisasi adalah pemilihan individu dalam kegiatan politik dengan jabatan yang diberikan pemerintah melalui media, anggota organisasi yang mencalonkan diri. Menurut Jack C. Plano menjelaskan bahwa kaderisasi atau penarikan anggota merupakan proses melakukan pemilihan formal pada posisi presiden, parlemen maupun aktivis²⁹.

Pengkaderan juga diartikan sebagai proses perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Kader pada mulanya adalah suatu istilah militer berdasarkan kata “carde” yang berarti pembinaan pada pasukan inti³⁰.

²⁸ Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Cet ke-3. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2006, hal.2

²⁹ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hal,19.

³⁰ Fattah, Nanang, (2000). *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. Hal, 54

Kaderisasi memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah pemahaman mengenai nilai atau ideology pada partai, visi, arah dari partai. Pemahaman atau ideology dari partai ini merupakan hal yang penting dikarenakan adanya visi dan misi dari partai untuk memberikan pengaruh serta pedoman bagi partai untuk mencapai tujuan.

Kegiatan kaderisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: (1) Ceramah dan diskusi. (2) Seminar. (3) Analisis kasus. (4) Simulasi. (5) penelitian; dan (6) pengalaman langsung. Metode ceramah dan diskusi biasanya diterapkan untuk semua tingkatan (remaja, menengah, mayor)

Kaderisasi sangat penting mengingat kebutuhan untuk menanamkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam studi tertentu. Fungsi Kaderisasi dalam partai politik adalah untuk menyiapkan caleg agar siap menerima kepengurusan partainya di masa mendatang. Pembaruan juga merupakan proses melatih anggota partai dan mempersiapkan mereka dengan keterampilan, spesialisasi, dan pengalaman yang berbeda untuk mencapai tujuan partai.³¹

Kaderisasi atau pembaruan diperlukan dikarenakan mereka yang sekarang menjadi pemimpin, suatu saat akan berhenti menjadi pemimpin. Proses ini bisa terjadi karena masa kepemimpinan seorang individu ditentukan organisasi, Anggota kelompok menentang keinginan kepemimpinannya sehingga perlu pergantian, proses alami, penuaan dan hilangnya kemampuan kepemimpinan dan yang terakhir adalah kematian. Kaderisasi merupakan sebuah cara yang perlu untuk dilanjutkan karena

³¹ *Ibid*, hal.51

akan memberikan gaya baru kepemimpinan yang cukup dan berkualitas sehingga dipersiapkan kader aktif yang lebih berkualitas dari generasi sebelumnya dan organisasi terus mengevaluasi kebutuhan jumlah, jenis dan kualitas kepemimpinan masa depan ³².

Dalam pelaksanaannya kaderisasi terdiri dari dua jenis yaitu³³ pendidikan nonformal disebut juga sebagai proses pendidikan yang meliputi pembelajaran di sekolah, kemungkinan orang tua (pembinaan keluarga), kemungkinan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler serta lingkungan. Dalam pembentukan kekuatan informal terdapat beberapa indikator atau kriteria kekuatan calon pemimpin yang berkepribadian positif dalam menjalani kepemimpinan yang mereka lakukan berdasarkan kemampuan prestasi, loyalitas, dan komitmen terhadap kelompok/organisasi yang berkarakter. Serta memiliki sikap yang pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, baik generasi sebelumnya maupun generasi muda yang dalam proses regenerasi ataupun kaderisasi harus sama-sama aktif melakukan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang berkualitas. Di sisi lain, kita juga harus proaktif dan menghindari atau tidak melakukan apa pun yang mengarah pada pemimpin yang kurang cakap. Maka setiap generasi sebelumnya, terutama yang banyak berkomunikasi dengan generasi muda

³² Veithzal, R, dan Mulyadi, D. (2011). Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi. Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, hal. 96

³³ *Ibid*, hal. 96

atau berada pada posisi kepemimpinan penting, harus memberikan contoh dan teladan untuk memimpin hal ini agar generasi muda menyerap sesuatu yang baik dengan baik sebagai seorang pemimpin yang menunjukkan sikap dan karakter yang baik.

Dengan demikian, perilaku yang menggambarkan kepribadian atau personalitas pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya dan bagaimana hidupnya, ternyata berdampak sangat signifikan terhadap proses pembaharuan informal. (Pengkaderan menunjukkan bahwa upaya penyiapan seseorang sebagai calon pemimpin dilakukan secara terencana, tertib, terstruktur, metodis, terarah, dan terencana. Kerja bahkan bisa diatur secara kelembagaan, sehingga lebih terlihat sifat formalnya. Untuk itu, proses pembaharuan mengikuti kurikulum yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan memuat materi teori dan praktik tentang kepemimpinan serta materi pendukung lainnya.

Kader merupakan hasil pembaharuan yang diperoleh karena rekrutmen politik. Kader dalam partai politik menentukan daya jual partai politik di masyarakat. Jika pola rekrutmen dan mekanisme pengkaderannya baik, maka akan menghasilkan kader yang berkualitas dan cakap pula, begitu pula sebaliknya. Terbentuknya kader-kader yang berkualitas dan cakap tentunya akan menonjolkan partai politik asal kader-kader tersebut.

Oleh karena itu, kualitas kader di partai politik sangat dipengaruhi oleh pola rekrutmen dan mekanisme kader partai. Bisa dibayangkan, partai politik sebagai sumber pemimpin bangsa tidak memiliki pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi

yang baik, tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Memang penerapan kaderisasi masih rancu dalam perpolitikan nasional, karena masih banyak pihak yang sulit membedakan keduanya.

Dalam kaderisasi terdapat proses untuk melakukan regenerasi, yaitu terdapat dua jenis proses diantaranya adalah regenerasi informal dan regenerasi formal. Proses regenerasi atau kaderisasi informal dapat dilihat dalam proses kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari masa kanak-kanak hingga remaja ke dewasa, hal ini dipandang sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga memiliki keunggulan dan rasa kompetitif dalam segala bidang kehidupan sosial. Regenerasi informal memiliki beberapa kriteria atau indikator yang menunjukkan kekuatannya, yaitu :

- (1) kepribadian positif;
- (2) ulet;
- (3) setia;
- (4) mengabdikan diri pada organisasi;
- (5) Karakter dan sikap berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan faktor yang mutlak menentukan.

Kaderisasi dengan cara formal, yaitu sebuah cara yang terencana, sistematis, terarah dan melembaga sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku dalam organisasi. Walaupun definisi kepemimpinan itu sendiri, menurut para ahli, seringkali

menggunakan kata-kata yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana ahli tersebut memandang arti dari kepemimpinan³⁴. Tead menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan dalam memengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan³⁵.

2.2.2 Fungsi Partai Politik dan Fungsi Rekrutmen Politik

2.2.2.1 Partai Politik

Tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Yaitu teori institusional yang melihat keterkaitan antara parlemen asli dengan kemunculan partai politik, teori situasi historis yang melihat kemunculan partai politik sebagai upaya sistem politik untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh perubahan sosial. Teori pembangunan yang memandang partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.³⁶

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip dalam Buku Miriam Budiardjo³⁷ yaitu partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan

³⁴ *Ibid.* Hal, 87.

³⁵ Kartono, Kartini. 1994. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.51.

³⁶ Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia, 1992, hal.113

³⁷ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 403

kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a government, with the further objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*)³⁸.

Sigmund Neumann yang dikutip dalam Miriam Budiardjo³⁹ mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut. Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*a political party is the articulate organization of society's active political agent; those who are concerned with the control of governmental policy power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent view*)⁴⁰.

2.2.2.2 Fungsi Rekrutmen Politik

Kemampuan partai melakukan komunikasi politik dan sosialisasi politik yang baik tidak hanya akan menguntungkan rakyat, tetapi juga akan memberikan manfaat kepada partai melalui rekrutmen partai. Sebab, rekrutmen anggota partai secara baik mustahil akan terlaksana apabila partai tidak menyelenggarakan komunikasi dan sosialisasi politik secara baik pula.

³⁸ *Ibid*, hal. 403

³⁹ *Ibid*, hal. 403

⁴⁰ *Ibid*, hal. 404

Pandangan Gabriel Almond terkait rekrutmen politik para kader-kader partai menarik untuk dicermati. Menurutnya, proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan dengan melakukan (a) komunikasi politik; (b) menjadi anggota organisasi; (c) mencalonkan diri untuk jabatan tertentu; (d) pendidikan dan (e) latihan (d) latihan⁴¹.

Sesuai dengan itu, Jack C. Plano berpendapat bahwa proses rekrutmen adalah upaya pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Sedangkan, rekrutmen politik menunjuk pada pengisian posisi formal dan legal (seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen), serta peranan peranan yang tidak formal (perekrutan aktivis dan propaganda)." Untuk melakukan fungsi rekrutmen tersebut, diperlukanlah institusi atau agen-agen tertentu, baik formal maupun informal. Partai politik yang merupakan salah satu institusi formal melakukan rekrutmen dalam rangka pengisian jabatan-jabatan politik⁴².

Proses rekrutmen merupakan hal yang menentukan kualitas organisasi kepartaian. Semakin demokratis proses rekrutmen semakin mudah pula potensi bangunan demokrasi internal partai diwujudkan. Muhadam Labolo menekankan bahwa selektifnya proses rekrutmen berdampak terhadap kemajuan organisasi partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas. Sebagai suatu unsur terpenting, tersedianya orang-orang yang mempunyai integritas mumpuni

⁴¹ Feri Amsari, Charles Simabura, Khairul Fahmi dkk, *Pembaharuan Partai Politik Di Indonesia Demokratisasi Internal Partai Politik*. Malang : Intrans Publishing, 2020, hal. 44

⁴² *Ibid*, hal. 44

dalam menggerakkan roda organisasi adalah suatu keniscayaan. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan kader partai politik seperti yang diharapkan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik. Tentu saja membangun proses rekrutmen yang demokratis tidak semudah yang dibayangkan⁴³.

Barbara Geddes menjelaskan bahwa terdapat empat model rekrutmen :

(a) *Partisanship* yakni rekrutmen politik dari partai yang dilakukan berdasarkan loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Konsep ini kurang memperhatikan kompetensi antarkader partai.

(b) *Meritocratic* adalah rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti senokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli, dan lain-lain.

(c) *Compartmentalization* merupakan rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokratis informasi bagi posisi posisi yang dipertimbangkan sebagai hal penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal.

(d) *Survival* yakni rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase⁴⁴.

⁴³ *Ibid*, hal. 45

⁴⁴ *Ibid*, hal. 46

Lili Romli menyebutkan bahwa terdapat dua cara dalam rekrutmen kader partai, yaitu rekrutmen secara terbuka yang berarti memberikan kesempatan bagi para warga yang sesuai dengan syarat serta memiliki minat dan bakat dapat bergabung menjadi anggota partai politik. Selanjutnya cara yang kedua adalah cara tertutup yaitu sebuah cara merekrut bagi para kerabat, orang tertentu, pejabat pemerintahan maupun pihak penguasa yang tidak diberikan ketentuan dalam proses rekrutmen itu sendiri. Proses ini sepenuhnya dibebaskan bagi para partai politik untuk mengatur proses penarikan anggota atau pun rekrutmen.

Mempersiapkan pengisian berbagai posisi dan jabatan politik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; di antaranya adalah jabatan presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, anggota dewan, dan sebagainya⁴⁵.

Rekrutmen politik menjadi sangat penting dalam memberikan warna dan peluang bagi terjadinya dinamika politik yang dapat menekan terjadinya otoriterisme, diktatorisme, dan kebuntuan politik dalam sistem tersebut. Sebagai perangkat penting demokrasi, partai tentu memiliki tujuan pembentukannya sendiri.

Lili Romli dan Miriam Budiardjo misalnya, menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ditujukan untuk dua hal. Pertama yaitu Pembentukan Parpol ditujukan pertama-tama sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Partai, menurut Lili Romli, dituntut untuk memiliki kepekaan dan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai potensi konflik yang dari waktu ke waktu intensitasnya semakin meningkat.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 46

Partai politik memiliki kewajiban untuk meredam dan mengatur potensi konflik agar tidak meledak dan menimbulkan masalah baru. Konflik memang secara alamiah ada, tetapi yang penting adalah bagaimana mengelola potensi konflik yang ada agar menjadi energi, spirit, dan support dalam merumuskan sebuah kebijakan politik untuk semua yang menguntungkan semua pihak⁴⁶.

Kedua, pembentukan Parpol ditujukan sebagai kontrol terhadap pemerintah. Miriam Budiardjo membedakan fungsi partai politik di negara demokratis, otoriter, dan negara-negara berkembang yang berada dalam transisi ke arah demokrasi. Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa.

Beberapa ahli memiliki cara pandang berbeda dalam melihat tujuan pembentukan partai politik. Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa partai politik merupakan organisasi yang mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Dengan demikian, pembentukan partai politik ditujukan demi kepentingan yang sangat demokratis dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara politik⁴⁷.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 47

⁴⁷ *Ibid*, hal. 47

2.2.3 Konsep Sayap Partai

Organisasi sayap partai adalah sumber penting lain dari pembaharuan partai politik. Internalisasi ideologi partai politik dan membangun sifat militansi pada sayap partai lebih mudah dilakukan daripada sumber pembaharuan yang datang dari organisasi masyarakat lainnya. Karena organisasi sayap merupakan bagian yang paling dekat dari partai politik ⁴⁸.

Organisasi sayap partai sangat mempromosikan partai politik dan berupaya untuk melaksanakan, mensosialisasikan dan menyebarluaskan program dan kebijakan partai. Organisasi partai dapat berupa organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, organisasi wanita, organisasi profesi dan organisasi keagamaan ⁴⁹.

Organisasi sayap partai berada di bawah kekuasaan langsung partai karena dibentuk oleh partai. Artinya, kebijakan partai politik selalu diikuti oleh organisasi yang dibentuknya berdasarkan hubungan garis vertikal tersebut. Partai politik jelas bertindak sesuai dengan kepentingan politik kelompok atau faksi tertentu. Partai politik sebagai organisasi jelas berorientasi pada kekuasaan. Setiap pemimpin organisasi memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan mengarahkan seluruh potensi organisasi ⁵⁰.

⁴⁸ Haris, S., Bhakti, I. N., Nurhasim, M., Nuryanti, S., Yanuarti, S., Tryatmoko, M. W., ... & Budiatri, A. P.. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: KPK-LIPI, 2016, hal 54

⁴⁹ *Ibid*, hal.54

⁵⁰ Miftah Thoha, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, Kencana, Depok, 2017, hal, 26

Sayap organisasi partai politik yang bertindak sesuai dengan kepentingan partai yang membentuknya mematuhi norma-norma yang membentuknya. Masyarakat sebagai bagian dari kepentingan politik dapat digunakan tidak hanya sebagai objek untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi juga sebagai objek perjuangan. Karena. Organisasi sayap partai politik harus berjuang atas nama partai induknya dan masyarakat umum dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah⁵¹

Hubungan vertikal antara sayap organisasi partai dengan partai induknya meminimalkan perjuangan sayap organisasi partai untuk kepentingan umum. Organisasi yang didirikan oleh partai politik berbeda status dan tujuannya dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Ormas No. 16 Tahun 2017 (UU Ormas) karena organisasi massa didirikan secara sukarela dan tujuannya adalah untuk kepentingan umum. hanya berdasarkan daerahnya masing-masing. Namun, para pembentuk dari undang-undang partai berharap agar organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai dapat memaksimalkan misi mulia, yaitu kemaslahatan bersama.⁵²

Ketentuan dalam penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa“Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang

⁵¹ Asmar, A. R. *Problematika Hukum Fungsi Rekrutmen Organisasi Sayap Partai Politik*. Paulus Law Journal, 2(2), 2021, hal. 102

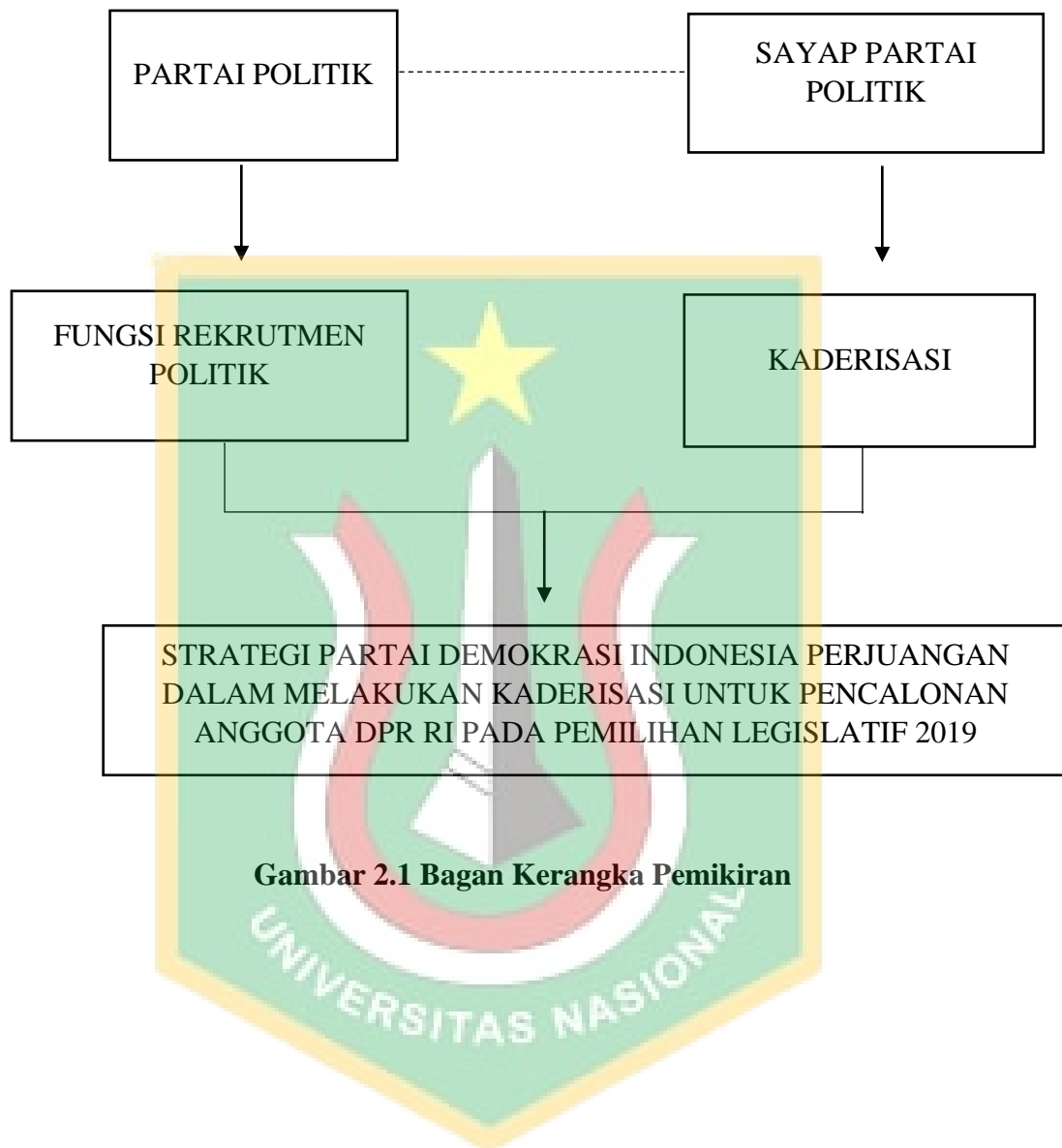
⁵² *Ibid*, hal. 103

dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik⁵³

2.3 Kerangka Pemikiran

Partai Politik sebagai jembatan bagi pencalonan anggota legislatif (DPR-RI) tentu memiliki peran penting untuk menentukan kader yang siap dan memiliki kapabilitas tinggi dalam melaksanakan tugas peyelenggaraan pemerintahan maupun negara, sehingga partai politik unggul harus mampu menarik, merekrut, memboding, dan mengkader anggota yang sangat berpotensi untuk maju dalam pileg tahun 2019. PDI-Perjuangan sebagai partai besar di Indonesia dan pada pemilu nasional tahun 2019 memiliki suara yang sangat unggul, gerakan-gerakan masif yang dibangun oleh para kader sangat komprehensif hingga ke akar rumput. Penentuan kader yang unggul untuk maju sebagai wakil rakyat tentu harus selaras dengan visi-misi partai. Setiap partai politik memiliki sayap partai sebagai bentuk strategi awal pengkaderan dan rekrutmen politik untuk terjun dalam politik nasional. Dominasi PDI-Perjuangan dalam rekrutmen dan kaderisasi politik tentu ada dukungan dari sayap partai yang sudah dibentuk. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran dalam penelitian Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Melakukan Kaderisasi Untuk Pencalonan Anggota DPR RI Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

⁵³ Pasal 12 huruf J UU No 2 Tahun 2008



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran